

**NARASI KESEJAHTERAAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM  
(ANALISIS MAQĀSID SYARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA  
DI KENDENG)**



Oleh:  
**NUR HASAN**  
**NIM: 18200010242**

**TESIS**

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Kajian Maqasid Syari'ah dan Analisis Strategi

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Nur Hasan**  
NIM : 18200010242  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid Syari'ah dan Analisis Strategik (KMAS)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Nur Hasan  
NIM: 18200010242

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Hasan**  
NIM : 18200010242  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinery Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid Syari'ah dan Analisis Strategik (KMAS)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**Nur Hasan**

NIM: 18200010242

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-454/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : NARASI KESEJAHTERAAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM  
(ANALISIS MAQĀSĪD SYARĪAH TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA DI  
KENDENG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HASAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010242  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61231ma385a7

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari  
SIGNED



Valid ID: 6125b7793af0ee

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6123000b3f88a

Penguji III

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.  
SIGNED



Valid ID: 6125b0a2499a8

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul;

**"NARASI KESEJAHTERAAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM  
(ANALISIS MAQĀSID SYARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA  
DI KENDENG)"**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Hasan**  
NIM : 18200010242  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid Syari'ah dan Analisis Strategik (KMAS)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP: 19760820 200501 1 005



## Abstrak

Salah satu persoalan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, adalah tingkat kesejahteraan masyarakat rendah di tengah sumber daya alam melimpah. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, pemerintah mempunyai tugas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Adanya sumber daya alam yang melimpah, membuat para pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah membuat berbagai kebijakan eksploitasi sumber daya alam dengan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati. Kabupaten yang memiliki kekayaan alam berupa bentang alam karts, ternyata tidak berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya Pati Selatan.

Adanya amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat, tentu harus dijalankan. Hal tersebut kemudian ditafsirkan dengan memberikan legalitas terhadap berbagai praktik eksploitasi sumber daya alam, seperti dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mendukung eksploitasi sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara. Oleh sebab itulah, penelitian ini menggali bagaimana Pemerintah Kabupaten Pati menarasikan makna kesejahteraan terhadap kebijakan yang dibuatnya. Begitu juga sebaliknya, bagaimana respon masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut. Untuk melihat kenapa pemerintah melakukan hal tersebut, dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, digunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Dengan mengambil fokus narasi kesejahteraan dibalik kebijakan eksploitasi SDA yang digali dari hasil penelitian lapangan. Terdapat beberapa hasil; bahwa narasi kesejahteraan dibentuk sebagai usaha agar masyarakat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati tentang eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara, ternyata tidak diterima oleh masyarakat akar rumput, dan melahirkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Sebab kebijakan tersebut bukan kebutuhan primer masyarakat yang mayoritas petani, dan yang terjadi justru mengancam kebutuhan primer mereka, yaitu air dan lahan pertanian.

Kata Kunci; *Eksplorasi, Kebijakan, Kesejahteraan, Maqāṣid Syarī'ah, Sumber Daya Alam.*



MOTTO

**"Menjadi Baik itu Mudah, Yang Sulit itu Menjadi Bermanfaat"**

**-KH. Sahal Mahfudh-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Saya Persembahkan Karya ini untuk Kedua Orang Tuaku**

**Ayahanda Bapak Masrur dan Almarhumah Ibu Purwati**

**Dan**

**Kepada Semua Manusia yang Telah Bersedia Merawat Lingkungan Hidup dan**

**Lingkungan Sosial dari Kerusakan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍāl</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓā'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

#### G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

## J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur bagi Allah swt. Atas rahmat dan taufiq-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad saw. juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti budi luhur dan ajaran yang dibawa olehnya pada jalan yang benar.

Tesis yang berjudul "Narasi Kesejahteraan Dan Eksploitasi Sumber Daya Alam (Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Kebijakan Negara Di Kendeng)", memuat tentang narasi kesejahteraan dan perbedaan makna kesejahteraan yang terjadi akibat adanya kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Penulis menyadari bahwa tesis yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada program studi Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tidak pernah luput dari dukungan, bantuan dan partisipasi dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, materil maupun moril, personal maupun institusi. Oleh sebab itulah, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. Dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., beserta Staff dan jajarannya. Karena telah menjadi pintu masuk bagi penulis untuk menimba ilmu dan menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.A yang selalu memberikan arahan

dan semangat kepada para mahasiswanya, termasuk penulis. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di jurusan Kajian *Maqāṣid Syarī'ah* dan Analisis Strategi yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis selama masa studi. Dan juga semua pegawai dan Staff di Prodi IIS yang selalu memberikan pelayanan dengan baik.

3. Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yaitu Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, yang telah sabar membimbing, mengoreksi, memberi saran dan kritik kepada penulis.
4. Keluarga penulis, khususnya Ayahanda tercinta Bapak Masrur dan Ibunda tercinta Almarhumah Ibu Purwati, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat hidup di kala sedang sulit dalam menjalani kehidupan. Dan juga kepada kakak kandung penulis Mbak Umi Sa'adah dan suaminya Mas Sutarno beserta para keponakan, yang senantiasa memberikan bantuan, semangat dan hiburan selama menulis tesis ini.
5. Kak Savic Ali dan Bapak Edi Mulyono yang banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk terus berkarya dan terus belajar.
6. Segenap teman-teman di rumah Islami.co Yogyakarta, yaitu Fairuz, Anwar, Mukhibullah dan Hilful yang banyak penulis repotkan. Tidak lupa kepada teman-teman kontrakan penulis, dan toko buku Theothrapi maupun Observasi Kopi yang sering penulis repotkan saat menulis tesis ini.
7. Teman-teman di jurusan Kajian Maqasid Syari'ah, dan teman ngopi dari sahabat Uno. Terkhusus sahabat-sahabat dekat penulis, yaitu Ahmad Royhan, Mas Dimas, Ibriza, Tjahyo, Ulfa, Leli, Mai. Dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Kepada Bu Gunarti, Bapak Suharno, dan Mustaq Zabidi, serta Mas Miftahul Munif di Pati yang telah membantu, memudahkan dan menjadi teman diskusi yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Kepada semua dosen yang pernah mengajar penulis di Kajian Maqasid Syari'ah dan Analisis Strategik, dan kepada semua guru penulis.



10. Kepada semua orang-orang baik yang pernah hadir di kehidupan penulis.



Yogyakarta, 04 Agustus 2021 M  
25 Dzulhijjah 1442 H.

Penyusun

Nur Hasan  
NIM. 18200010242

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan .....	13
D. Kajian Pustaka .....	14
E. Kerangka Teoritis .....	18
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	32
 <b>BAB II. SELAYANG PANDANG PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DI KABUPATEN PATI .....</b>	 <b>35</b>
A. Pendahuluan .....	35
B. Letak Geografis dan Kekayaan Sumber Daya Alam Serta Potensi Ekonomi di Pegunungan Kendeng Utara .....	36
1. Pegunungan Kendeng Utara di Pati.....	39
C. Tipologi Masyarakat yang Hidup di Sekitar Pegunungan Kendeng Utara	41
1. Kultur Dua Kelompok Masyarakat yang Hidup di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara.....	42
2. Kearifan Lokal Masyarakat Petani di Pegunungan Kendeng Utara	45
3. Suku Samin, Masyarakat Adat yang Hidup di Pegunungan Kendeng di Pati	48
4. Gerakan Ekopopulisme Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng	53

<b>BAB III. MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.</b>	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Definisi dan Paradigma Baru <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	60
1. Makna <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Menurut Para Ulama.....	61
C. Paradigma Baru <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> : Dari <i>al-Daruriyat al-Khamsah</i> Menjadi Empat Dimensi Kehidupan Manusia.....	65
D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dan Kesejahteraan Sosial.....	73
<b>BAB IV NARASI KESEJAHTERAAN DAN RESPON MASYARAKAT KENDENG TERHADAP KEBIJAKAN EKSPLOITAI SUMBER DAYA ALAM...</b>	78
A. Pendahuluan.....	78
B. Narasi Kesejahteraan Pembangunan dan Kebijakan Eksploitasi SDA.....	79
1. Pati Bumi Mina Tani, Buminya Subur Namun Masih Miskin.....	83
2. Kebijakan-Kebijakan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng	87
3. Membangun Narasi Eksploitasi Sumber Daya Alam Demi Kesejahteraan	93
3.1 Industri Semen: Yang Dinantikan Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Mewujudkan Kesejahteraan.....	98
4. Dilema Industri Semen; Membangun Ekonomi dan Merusak Lingkungan	102
5. Memperkuat Narasi Kesejahteraan Eksploitasi Sumber Daya Alam Dengan Mobilisasi Dukungan.....	107
6. Kesejahteraan: Makna yang Diperdebatkan di Pegunungan Kendeng, Pati	117
6.1 Bertani dan Menjaga Lingkungan Sebagai Jalan Hidup Sejahtera	124
6.2 Keberlanjutan Lingkungan Hidup Sebagai Kebutuhan Primer Masyarakat Kendeng.....	127
C. Konflik dan Perlawanan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pertambangan	133
D. Absennya Pemimpin Kharismatik dalam Konflik Kendeng.....	139
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	143
A. Kesimpulan.....	143
A. Saran.....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	148

## DAFTAR SINGKATAN

ASC	: Acintyacunyata Speleological Club
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAT	: Cekungan Air Tanah
CSR	: Corporate Social Responsibility
DAS	: Dasar Aliran Sungai
Ha	: Hektar
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDI	: Human Development Index
HP	: Hutan Produksi Tetap
HPT	: Hutan Kegiatan Terbatas
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
ISS	: Indonesian Speleological Society
JMPPK	: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng
Kayandu	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KBAK	: Kawasan Bentang Alam Karts
KMAN	: Kongres Masyarakat Adat Nusantara
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MA	: Mahkamah Agung
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PDRB	: Pendapatan Daerah Regional Bruto
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
PemProv	: Pemerintah Provinsi
PP	: Peraturan Presiden
Propenas	: Program Pembangunan Nasional
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permen	: Peraturan Menteri
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SK	: Surat Keputusan
SMS	: Sahabat Mulia Sakti
SG	: Semen Gresik
SDA	: Sumber Daya Alam
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UU Perlantan	: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
WTO	: World Trade Organizati

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tiga dasawarsa terakhir, Indonesia menjadi negara yang menggantungkan hidup dan perekonomiannya pada kesuburan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari minyak bumi, batubara, tembaga, emas, timah dan lainnya. Ketergantungan ini kemudian menguras isi perut bumi, dan menyisakan sisa galian yang memerlukan biaya pengembalian alam tidak sedikit. Kerugian akibat kerusakan lingkungan yang diderita manusia terwujud dalam berbagai bentuk bencana yang terjadi,<sup>1</sup> seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Kesuburan alam Indonesia yang kaya dengan SDA nya kemudian dieksploitasi dengan dalih pembangunan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adanya keinginan seseorang atau bangsa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, menjadi salah satu penyebab rusaknya ekosistem yang ada.<sup>2</sup> Pembangunan yang hanya bertumpu untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, dan mengeksploitasi alam juga telah banyak melupakan nilai-nilai etis dan fungsi lingkungan hidup. Begitu juga dengan perubahan sistem ekonomi akibat liberalisasi perdagangan, disinyalir ikut mempercepat kerusakan alam. Karena dalam perdagangan bebas, pakar ekonomi selalu bangga dan optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan peningkatan kapasitas penggunaan SDA.<sup>3</sup> Sedangkan fenomena kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh operasi industrialisasi dan pertambangan,<sup>4</sup> yang digunakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek nasional dan pembangunan ekonomi. Eksploitasi SDA yang berlebihan untuk pembangunan ekonomi yang sering

---

<sup>1</sup> Fachruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 16.

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1986, cet. Ke-1), 10.

<sup>3</sup> Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, 1.

<sup>4</sup> KH. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 14.

ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, justru melahirkan banyak degradasi terhadap lingkungan hidup dan fungsinya.

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara, termasuk Indonesia, adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun, modernisasi dan pembangunan yang berlangsung selama ini telah menimbulkan banyak bencana bagi lingkungan hidup. Bencana alam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat globalisasi ekonomi, menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Melalui pembangunan dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan-perusahaan asing secara terus menerus menyerobot tanah, air, hutan dan tambang-mineral.<sup>5</sup> Kebijakan-kebijakan pembangunan yang terjadi seringkali bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan hidup, yang mengakibatkan berbagai dampak kehidupan sosial-ekonomi, dan budaya masyarakat. Padahal hubungan manusia dengan lingkungannya, tidak hanya sebatas bagaimana memanfaatkannya demi mengambil keuntungan materi saja. Lebih dari itu, dalam hamparan alam yang ada di hadapan kita, mengandung sejumlah efek sosial, politik, budaya dan lainnya.<sup>6</sup> Hal tersebut tidak lain karena dalam demokrasi liberal, terdapat "*narasi*" besar yang mengabaikan hadirnya "*narasi-narasi alternatif*" seperti Islam, kearifan lokal masyarakat adat, dan sebagainya.<sup>7</sup> Dan negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, mempunyai problem berupa pendapatan negara yang rendah, sehingga berakibat pada banyaknya operasi-operasi industri pertambangan yang mengeksploitasi SDA untuk menunjang pembangunan ekonomi, dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. Karena pembangunan ekonomi dianggap sebagai titik utama dalam mensejahterakan masyarakat, sekaligus jembatan menuju negara yang masyarakatnya sejahtera. Sehingga eksploitasi

---

<sup>5</sup> *Politik dan Lingkungan*, ed. Sarwono Kusumaatmadja, (Yogyakarta: Penerbit Koekoesan, 2007), 11-12.

<sup>6</sup> *Politik dan Lingkungan*, 13.

<sup>7</sup> Boni Hargens, *Demokrasi Radikal: "Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Postmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe"* (Jakarta: PARHRHESIA, 2006), 8-9.



terhadap SDA seringkali atas nama pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai proyek strategis negara, seperti; pembangunan infrastruktur jalan tol, bendungan, bandara, dan berbagai proyek strategis nasional lainnya membawa berkah bagi para pelaku eksploitasi SDA, dalam hal ini industri semen untuk melakukan pendirian pabrik-pabrik baru. Ekspansi industri semen sendiri telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang mempunyai kandungan bahan baku memadai untuk produksi semen, yaitu batuan karts, seperti yang ada di Pegunungan Kendeng Utara. Operasi-operasi industri pertambangan tersebut, tidak lain dengan dalih pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan Pegunungan Kendeng Utara yang ada di Pati, adalah salah satu sasaran ekspansi industri semen yang pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1990. Tetapi, hal tersebut mulai terlihat nyata pada tahun 2006 ketika PT Semen Gresik (sekarang PT Semen Indonesia) berencana mendirikan pabrik di Kecamatan Sukolilo, Pati, dengan total investasi 3,5 Triliun, dan membutuhkan lahan sekitar 2000 hektar. Dari luas tersebut, 900 ha untuk konsensi penambangan batu kapur terletak di Desa Tompegunung, Summersoko, Kedumulyo, dan Gadurejo, Kec. Sukolilo. Lokasi penambangan tanah liat seluas 500 ha terletak di Desa Gadurejo, Kedumulyo, Baturejo, Kasiyan, dan Sukolilo. Sedangkan lokasi pabrik semen seluas 75 hektar terletak di Kedumulyo.<sup>8</sup> Namun rencana pembangunan pabrik semen tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Selama empat tahun berjuang menolak rencana pendirian industri pertambangan, dan berhasil menggagalkan pembangunan PT SG pada tahun 2010. Tidak berselang lama, muncul PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya yaitu PT Sahabat Mulia Sejahtera

---

<sup>8</sup> Arif Novianto, "*Berebut Saminisme: Artikulasi Politik Masyarakat Adat dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*" ed. Ed. Wahyudi Kumorotomo dan Yuyun Purbokusumo, Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2020), 241.

(SMS) yang berupaya berekspansi ke Kec. Tambakromo dan Kayen, Kab. Pati,<sup>9</sup> yang merupakan tetangga Kecamatan Sukolilo.

Upaya industri semen menanamkan investasi dan mengeksploitasi SDA Pegunungan Kendeng Utara, tidak lain adalah untuk meningkatkan perekonomian yang sering dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pati. Karena dengan hadirnya industri semen tersebut, perputaran ekonomi di Pati, khususnya di Pati Selatan akan meningkat, sekaligus akan membuka lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat kemiskinan di Pati. Hadirnya praktik pertambangan industri semen juga dianggap membawa kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemkab Pati mendukung hal tersebut dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Berbagai narasi kesejahteraan pun dibentuk oleh pemerintah, sebagai usaha agar kebijakan yang dibuat diterima masyarakat. Namun, yang terjadi adalah kebijakan tersebut melahirkan banyak konflik, salah satunya antara pemerintah dengan masyarakat dan juga antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan perbedaan pandangan. Kelompok yang menolak kebanyakan adalah mereka yang merasa kehidupannya terancam, akibat adanya kebijakan eksploitasi SDA yang dibuat pemerintah. Mereka adalah para petani, dan masyarakat adat Sedulur Sikep yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian, dan kelestarian alam Pegunungan Kendeng Utara, Pati.

Konflik pengelolaan SDA di Pegunungan Kendeng Utara juga dilatarbelakangi adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemkab, dan perbedaan pandangan dalam memanfaatkan SDA di Pegunungan Kendeng. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang ingin mendapat peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) membuka keran investasi besar-besaran, yaitu dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati, dengan menjadikan kawasan Pegunungan Kendeng Utara sebagai

---

<sup>9</sup> Novianto, *Berebut Saminisme*, 242.

kawasan peruntukan industri dan pertambangan, dari yang asalnya kawasan lindung dan pariwisata. Kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Pati pun berhasil menarik banyak investor besar untuk menanamkan modalnya, seperti: PT Semen Gresik dengan total investasi 4,5 T dan PT Sahabat Mulia Sakti dengan total investasi 6 T. Para investor tersebut kemudian menggalang dukungan dari Pemkab Pati dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kelompok yang secara tidak langsung pro terhadap kapitalisme tersebut, memunculkan narasi kesejahteraan dengan menggunakan perspektif ekonomi, yaitu pentingnya eksploitasi Pegunungan Kendeng Utara melalui pertambangan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Pati, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pati. Karena pundi-pundi keuangan yang masuk melalui investasi, kemudian bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Logika dan narasi inilah yang dibangun, dan dimunculkan oleh pihak pro pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Narasi tersebut kemudian terinstitusikan ke dalam beberapa Surat Keputusan, serta aturan yang sebenarnya digunakan untuk menjustifikasi kepentingan pihak yang pro eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng. Institusionalisasi narasi tersebut diharapkan menciptakan kepatuhan dari masyarakat.

Beberapa institusionalisasi tersebut diantaranya: (a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 128 tahun 2008 tentang Penetapan Karst Sukolilo; (b) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 6660.1/27/28, tanggal 31 Desember 2008, tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Gresik di Pati; (c) Surat Bupati Pati No. 131/1814/2008 terkait Pertambangan dan Rencana Pertambangan Pabrik sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Pati; (d) Kantor Izin Pelayanan Perizinan terpadu dengan izin lokasi nomor 591/058/2008; (e) Hasil penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan beberapa Perguruan Tinggi dari PPLH Universitas

Diponegoro Semarang yang mendukung eksploitasi di Pegunungan Kendeng.<sup>10</sup> Dengan kondisi alamnya yang subur dan kaya SDA, Kabupaten Pati masih berada pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Sehingga perlu adanya pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Kemiskinan dan perekonomian inilah yang menjadi tolok ukur Pemkab Pati menilai kesejahteraan masyarakatnya.

Narasi kesejahteraan yang dibangun oleh pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat, ternyata mendapat penolakan dari masyarakat lokal di Pati Selatan. Kelompok yang kontra rencana pendirian industri semen, membantah beberapa aturan serta keputusan yang digunakan untuk mendukung rencana pendirian industri pertambangan di Pegunungan Kendeng Utara. Di antara aturan yang dijadikan landasan penolakan tersebut: (a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi "*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.*"; (b) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional; (c) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Kabupaten Pati dan Kecamatan Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan di Kabupaten Grobogan. Serta Kecamatan Todanan, di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah serta kawasan Karst Sukolilo.<sup>11</sup>; (d) Penelitian Acintyacunyata Speleological Club (ASC) yang dilakukan pada tahun 1994, 2006 dan 2008 meliputi Kabupaten Pati, Grobogan dengan ditemukannya sumber air yang berada di semua level ketinggian 5450 mdpl dan 71 gua, yang sebagian besar adalah gua berair. Berdasarkan penelitian tersebut, kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara adalah kawasan karst aktif.

---

<sup>10</sup> Dian Chandra Buana, "*Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa (Studi Kritis Perlawanan Hukum Masyarakat Adat Sikep Terhadap Pendirian Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati*" Jurnal Politika: Vol.8 No.1 (2012), 111.

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo, 112.

Termasuk dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Pembangunan Yogyakarta yang menyatakan bahwa Pegunungan Kendeng adalah kawasan karst.<sup>12</sup>

Kuasa makna kesejahteraan dibalik kebijakan eksploitasi SDA yang dibangun oleh penguasa dengan berbagai narasinya mendapat penolakan masyarakat, karena adanya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Sebab, Pegunungan Kendeng Utara yang membentang dari Kabupaten Grobogan, Pati, Rembang, Blora Jawa Tengah dan Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jawa Timur. Selain menyimpan batu kapur yang menjadi bahan baku semen, bahan bangunan, bahan cat, kosmetik, dan lainnya. Pegunungan Kendeng berfungsi sebagai tempat penyimpanan air untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, dan irigasi ratusan hektar sawah masyarakat sekitar, seperti di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo. Oleh karena itu, masalah yang timbul akibat adanya kebijakan pertambangan batu karts melingkupi masalah sosial, seperti konflik antara pendukung dan penolak tambang yang berakar pada perbedaan data tentang luasan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), dan konflik hubungan di mana masing-masing pihak memiliki stigma tentang masing-masing.<sup>13</sup> Apalagi dalam pembangunan, seringkali terjadi jarak lebar antara niat, realisasi dan harapan. Ancaman kerusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat lokal, menjadi alasan keresahan kelompok kontra eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara, Pati.

Motivasi mencari laba dengan jalan pembangunan dan eksploitasi SDA, di sisi lain justru bisa menghambat keinginan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan SDA yang berlebihan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, justru menghambat pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap menjaga perekonomian bisa dikatakan

---

<sup>12</sup> Dian Chandra Buana, *Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa*, 111-112.

<sup>13</sup> *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan* (Jakarta: Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), 250.



lebih luas karena menyangkut juga menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat secara luas. Di mana hal tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika lingkungan rusak, maka penjagaan terhadap perekonomian juga rusak.<sup>14</sup> Efek salah kelola dalam pengelolaan ekonomi yang merusak lingkungan, juga mempunyai dampak sosial yang tidak bisa dihindari. Mulai dari epidemi sosial, penurunan kualitas hidup, munculnya penyakit-penyakit sosial, seperti: prostitusi dan kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, sampai kemiskinan dan konflik sosial yang lainnya. Efek sosial tersebut terjadi karena kelalaian dalam mengelola lingkungan dan alam secara benar.<sup>15</sup> Negara-negara berkembang seperti Indonesia menjadikan alam sebagai objek yang harus dikuasai, bukan dijadikan subjek atau sahabat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang terjadi dengan rencana pembangunan industri semen dan pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Apalagi dalam RTRW Kabupaten Pati, terdapat tumpang tindih dalam mengelola kawasan Pegunungan Kendeng Utara seperti: kawasan karst yang ada di Pegunungan Kendeng termasuk ke dalam kawasan hutan produksi,<sup>16</sup> kawasan peruntukan pertambangan,<sup>17</sup> kawasan hutan lindung,<sup>18</sup> kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.<sup>19</sup> Kawasan karst dalam RTRW Pati juga disebutkan sebagai kawasan yang dilarang untuk melakukan penambangan.<sup>20</sup> Dari sini kemudian muncul sebuah perdebatan, karena dalam RTRW sudah jelas bahwa terdapat kawasan-kawasan yang dilarang untuk melakukan usaha atau penambangan yang merusak lingkungan. Namun selama ini, kawasan tersebut tetap menjadi lahan tambang, baik illegal maupun legal.

---

<sup>14</sup> Abdul Majjid Najjar, *Maqāṣid Syarī'ah bi Ab'ad Jadīdah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 2008), 186.

<sup>15</sup> *Politik dan Lingkungan*, 13.

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pati 2011-2030, 52.

<sup>17</sup> *RTRW Pati 2011-2030*, 68.

<sup>18</sup> *Ibid.* 44.

<sup>19</sup> *Ibid.* 52.

<sup>20</sup> *Ibid.* 53.



Adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak menjadi jaminan terjadinya pemerataan kesejahteraan, dan kestabilan politik. Ketidakadilan yang muncul dalam politik dan ekonomi suatu bangsa, juga sudah pasti terjadi dalam bidang lingkungan. Sehingga muncul gerakan-gerakan yang memperjuangkan keadilan di bidang lingkungan hidup di berbagai negara sampai detik ini.<sup>21</sup> Padahal pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan negara, seperti ditetapkan dalam pasal 28 H dan 33 UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2 menyatakan, "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke-empat menyatakan, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan lingkungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*" Sedangkan pasal 3 UU nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Negara Indonesia adalah organisasi yang memiliki tujuan seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa yang terdapat dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 alenia keempat, "*kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.*" Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 27, bahwasanya "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan*

---

<sup>21</sup> Politik dan Lingkungan, 82.

<sup>22</sup> Politik dan Lingkungan, 32.

*penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Begitu juga dalam Pasal 31 yang mengatur pelayanan pendidikan, Pasal 33 dan Pasal 34 tentang kekayaan alam yang harus digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi dalam ilmu modern, kesejahteraan sering dimaknai dengan kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan individu atau masyarakat.<sup>23</sup> Kemudian bebas dari penyakit dan bebas dari derita.<sup>24</sup> Kesejahteraan juga sering diartikan terpenuhinya ekonomi, terhindar dari kemiskinan dan terjadi persamaan dan stabilitas sosial serta terwujudnya ekonomi.<sup>25</sup> Oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), indikasi kesejahteraan kemudian diukur melalui *Human Development Index* (HDI) dengan tiga aspek yaitu tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan tingkat standar hidup.<sup>26</sup> Namun yang sering terjadi dalam merumuskan sebuah kebijakan, kesejahteraan hanya diukur dengan hal-hal yang sifatnya material seperti pendapatan ekonomi. Padahal nilai-nilai agama, lingkungan hidup dan budaya sangat penting ketika ingin mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi, hubungan antara nilai-nilai agama atau kepercayaan masyarakat adat dengan modernitas merupakan problematika yang terus-menerus mendapat perhatian dari para pemikir. Karena nilai-nilai agama sebagai landasan normatif dari agama, mau tidak mau harus berhadapan dengan modernitas yang selalu berjalan dengan cepat. Salah satu dari produk modernitas adalah globalisasi yang identik pembangunan dan industrialisasi. Sebagai negara beragama, nilai-nilai agama tentu menjadi dasar dalam bernegara yang termanifestasi dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Maka kebijakan pemerintah dalam hal apapun, termasuk dalam pembangunan maupun pembuatan Undang-Undang harus

---

<sup>23</sup> AS Hornby, *Oxford Advanced Learn's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 1352.

<sup>24</sup> S Stephenson Smith, *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language* et.al (Florida: Tident Press International, 1996), 1428.

<sup>25</sup> Robert E Goodin, *The Real Words of Welfare Capitalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). Lihat, Satria Hibatal Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam* (Ponorogo: CIOS, 2015), 5.

<sup>26</sup> Mark Mc Gillivray, *The Human Development Index: Yet Another Redudat Composite Development Indicator? World Government* (Great Britain: Pergamon Press, Vol. 19 No. 10. 1991), 1461.

mencerminkan suatu kebijakan yang selaras dengan perikehidupan, dan kenyamanan seluruh masyarakat.

Dalam kasus kebijakan eksploitasi SDA, Peraturan perundan-undangan RTRW menjadi pintu masuk pembangunan dengan struktur yang hierarkis dan terpusat, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah wilayah, kemudian ke pemerintah daerah kabupaten. Karena dalam negara modern, ciri khas yang ada adalah organisasi birokratif terpusat, hierarkis, dan dibagi-bagi menjadi institusi dan organ yang berbeda, serta memiliki fungsi masing-masing.<sup>27</sup> Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengeksploitasi SDA bisa dilihat dalam RTRW, karena di dalamnya mengatur tentang daerah-daerah yang kaya SDA dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi. Setiap kegiatan dan usaha manusia dalam pembangunan, tentunya harus menyeimbangkan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Artinya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 18 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa "*setiap pendirian usaha, yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup wajib mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Adanya kepemilikan izin dalam bidang usaha, merupakan upaya untuk membatasi hak-hak dan kewajiban bagi para pemilik usaha. Serta untuk melindungi, dan mengendalikan dampak lingkungan hidup dari pemanfaatan sumber daya yang diambil dari alam.

Oleh karena itu, setiap pendirian dan pengelolaan usaha harus memiliki izin dan bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan. Namun, kebijakan-kebijakan yang lahir justru menjadi justifikasi untuk melegalkan pembangunan demi pertumbuhan dalam satu bidang, yaitu perekonomian. Padahal hal tersebut bisa menyebabkan tekanan, dan kerusakan

---

<sup>27</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 147-149.

SDA yang dimiliki Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menyadari hal ini sejak tahun 1970, ketika Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendirikan jaringan untuk membela proteksi lingkungan, memfasilitasi dan membangun kapasitas lingkungan melalui pertukaran informasi.<sup>28</sup> Di sisi lain, masyarakat miskin menjadi miskin bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk menemukan penghidupan yang lebih baik, atau karena tidak mau bekerja. Masalahnya tidak berasal dari masyarakat itu sendiri, tetapi dari sistem ekonomi yang menyebabkan sebagian orang miskin.<sup>29</sup> Oleh karena itulah, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, agama, budaya maupun lingkungan hidup, secara baik dan harmonis. Dengan pengarusutamaan kemaslahatan umum yang dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan sekadar dalam prinsip global. Sehingga manusia harus menjadi landasan normatif dan muara etis dari tata pemerintahan, melalui prinsip "*ghayat wal wasa'il*" atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan negara sebagai medianya.<sup>30</sup>

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini dianggap penting, karena berusaha mengulik bagaimana pemerintah membangun narasi kesejahteraan melalui praktik eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Khususnya, melalui keran investasi besar-besaran yang berpotensi besar terhadap kerusakan lingkungan hidup, dan menimbulkan konflik sosial. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah, dalam hal ini adalah Pemkab Pati mengidentifikasi sebuah permasalahan hingga menjadi kebijakan. Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan untuk melihat bagaimana kesejahteraan dimaknai oleh pemerintah dan masyarakat. Sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan

---

<sup>28</sup> Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 87-88.

<sup>29</sup> Bagus Aryo, *Tenggelam Dalam Neoliberalisme?: Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskinan* (Depok: Penerbit Kepik, 2012), 84.

<sup>30</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa*, Jurnal Pesantren, No. 3 Volume VI (1989), 75.

tersebut. Oleh sebab itulah, penelitian ini dianggap penting. Karena eksploitasi SDA di Pati Selatan yang dianggap membawa kesejahteraan, justru dianggap sebagai hama bagi para petani. Karena di era modern, hama bagi para petani bukan hanya tikus dan wereng tetapi industri-industri pertambangan yang memusnahkan para petani dengan mematikan sumber mata air dan merusak kelestarian alam.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan yang terjadi di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam kajian dan penelitian yang dilakukan ini adalah; *Pertama*, bagaimana penguasa (Pemkab Pati) membentuk makna kesejahteraan lewat praktik eksploitasi sumber daya alam di Pegunungan Kendeng, Pati? *Kedua*, apakah makna kesejahteraan dengan beragam narasi yang dibangun Pemkab Pati menjadi imaji sosial, atau diterima di tengah kehidupan masyarakat Pati Selatan? *Ketiga*, apakah kebijakan-kebijakan eksploitasi sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara mendekatkan pada cita-cita mewujudkan kesejahteraan? Ketiga rumusan masalah inilah yang akan peneliti jabarkan dengan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*, dan tugas-tugas kenegaraan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah*.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Hadirnya sebuah pemikiran, tidak bisa lepas dari pesan atau tujuan yang ingin disampaikan oleh sang pemikir. Begitu pula hadirnya penelitian ini, tidak bisa lepas dari tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Oleh sebab itulah, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, mulai dari sebuah upaya untuk melihat bagaimana usaha mewujudkan kesejahteraan dengan jalan pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi SDA justru berujung pada kerusakan lingkungan, dan hilangnya hak-hak masyarakat lokal, serta melahirkan konflik di tengah kehidupan masyarakat. Upaya mewujudkan sebuah kesejahteraan dalam konteks negara, tentu tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang



dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itulah, penelitian ini juga bermaksud untuk melihat sejauh mana negara hadir dalam setiap upaya mensejahterakan rakyat. Terakhir, tujuan penelitian ini mengajak semuanya untuk bersama-sama melihat bahwa kesejahteraan hidup umat manusia di bumi, tidak bisa lepas dari kelestarian alam yang ada di sekitarnya. Di mana kelestarian alam atau terjaganya lingkungan hidup menjadi kunci terjaganya aspek kehidupan manusia yang lainnya, seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan perekonomian. Sehingga ketika alam terdegradasi akibat eksploitasi besar-besaran, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan sebagaimana amanah dalam UUD 1945 tidak akan pernah terwujud. Oleh sebab itulah, paradigma baru kesejahteraan yang didasarkan pada *Maqāṣid Syarī'ah* perlu diperkenalkan melalui penelitian ini.

Sedangkan dari segi kegunaan, baik teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat, dan masukan terkait diskusi-diskusi maupun keilmuan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tata pemerintahan. Karena *Maqāṣid Syarī'ah* bukan hanya digunakan untuk menjadi bahan kajian dalam bidang hukum Islam saja, tetapi juga dalam bidang keilmuan lain, seperti kebijakan publik dan lainnya. Hal ini tentu berkaitan dengan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan, yaitu adanya seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan memihak kepada kepentingan masyarakat umum lewat kebijakan yang dibuatnya. Penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan informasi, serta bisa memberikan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Isu kesejahteraan melalui jalan pembangunan tentu tidak bisa lepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Apalagi dalam konteks negara bangsa, pandangan keagamaan masyarakat mempunyai pengaruh dalam melihat dan memanfaatkan alam bisa menjadi bagian dari nalar publik dalam melihat kesejahteraan dan membuat



kebijakan, salah satunya adalah dalam ranah pembangunan. Setiap adanya pembangunan tentu mempunyai dampak atau ancaman terhadap lingkungan hidup, dan masyarakat terdampak. Sedangkan keberlanjutan lingkungan hidup sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, termasuk dengan kesejahteraan itu sendiri. Setiap pembangunan pasti ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Hal inilah yang menjadi pemicu pro dan kontra dalam setiap pembangunan, termasuk rencana pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Oleh karena itulah, isu tersebut banyak dikaji dan dibahas oleh para akademisi dan peneliti. Sehingga berdasarkan studi-studi sebelumnya, kajian terhadap wacana kesejahteraan dibalik pembangunan pabrik semen dan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara beserta pro dan kontranya, terdapat beberapa kecenderungan penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana berikut;

Pertama, penelitian yang cenderung fokus pada konflik ekologi dan kepentingan di Pegunungan Kendeng Utara, seperti yang dilakukan Ubaidillah Achmad dengan judul *Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar Rumput* (2016). Dalam penelitian tersebut terdapat temuan-temuan tentang konflik ekologis yang berlangsung di Rembang, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, dan adanya kiai yang mendukung pabrik semen, hingga peran masyarakat dan santri dalam pusaran konflik tersebut. Namun penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang manusia dan kesemestaan yang mempunyai relasi timbal balik secara integral. Seperti para nabi dan pewaris para nabi yang mengajarkan suluk lingkungan, seperti pembersihan jiwa yang mempunyai dampak terhadap pencerahan kesadaran dan pentingnya menjaga kelestarian dan pemulihan alam, serta harmoni antara manusia dan lingkungan. Penelitian tersebut juga membahas tentang bagaimana manusia melaksanakan tugas dalam mempertahankan kelestarian lingkungan berdasarkan teks agama. Dan juga menyinggung perihal pendidikan Islam masih berhenti pada pendidikan akhlak yang terbatas relasi manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Namun, sedikit sekali

pendidikan Islam yang membahas penguatan relasi antara manusia dengan alam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tia Subekti yang berjudul *Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia* (2016). Temuan dalam penelitian berupa adanya kontradiksi kepentingan antara masyarakat dan penguasa dalam pemanfaatan Pegunungan Kendeng Utara.<sup>31</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suharko dengan judul *Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016* (2016). Temuan-temuan dalam penelitian ini adalah tentang peta konflik antara masyarakat adat dengan pabrik semen sejak 2007 dan upaya resolusi konflik yang dilakukan.<sup>32</sup>

Kedua adalah penelitian yang fokus pada bagaimana wacana kesejahteraan itu hadir lewat pembangunan industri pertambangan. Penelitian yang terkait dengan hal ini, adalah yang dilakukan Hendra Try Ardianto dengan judul *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan 'Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan'* (2016). Penelitian tersebut mengungkap tentang polemik pembangunan Pabrik Semen yang ada di Rembang dan mengungkap wacana kesejahteraan untuk memuluskan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, untuk mengeksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara. Dalam penelitiannya, Hendra berkesimpulan bahwa konsep pembangunan apapun yang dicanangkan oleh pemerintah tetap saja akan merusak SDA. Dan berbagai konsep pembangunan yang ada hanyalah akal-akalan untuk memuluskan adanya investasi, dan mengeksploitasi SDA atas nama kesejahteraan. Dalam penelitiannya tersebut, Hendra lebih fokus mengungkap bagaimana sebuah kebijakan tersebut lahir hingga mendapat penolakan masyarakat luas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Faqih dengan judul *Hegemoni Wacana*

---

<sup>31</sup> Tia Subekti, "Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia" Jurnal Transformative, Vol. 2. Nomor 2, (September), 160.

<sup>32</sup> Suharko, "Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016" JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 20, Nomor 2, (November), 111.

*Kesejahteraan dalam Pembangunan Mega Industri Global Hub di Lombok Utara* (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah menemukan hal yang berbeda dari praktik wacana kesejahteraan yang dilakukan oleh penguasa lewat pembangunan. Karena artikulasi makna kesejahteraan melalui pembangunan tidak mendapatkan perlawanan masyarakat atau diterima oleh masyarakat.

Ketiga adalah penelitian yang fokus pada keadilan sosial dan konsep kesejahteraan dalam Islam yang mengacu pada *Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian yang terkait adalah penelitian yang ditulis oleh Ismail dengan judul *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu)* Pascasarjana UIN Malang (2018). Kedua adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin dengan judul *Negara Kesejahteraan dan Maqāṣid Syarī'ah "Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah* (2019) dalam Jurnal Falah Ekonomi Syari'ah. Dan ketiga penelitian Hamdani dengan judul *Negara Sejahtera dengan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah* dalam Al-Mabsut (2020). Ketiga penelitian ini membicarakan tentang kesejahteraan dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Dalam penelitian yang pertama, *Maqāṣid Syarī'ah* klasik dijadikan sebagai alat untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani dan unsur-unsur yang mempengaruhi kesejahteraan.<sup>33</sup> Namun didasarkan pada konsep-konsep klasik *al-daruriyat al-khamsah*. Sedangkan penelitian kedua, membicarakan mengenai konsep kesejahteraan dan *Maqāṣid Syarī'ah*, di mana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* harus memenuhi empat dimensi yaitu individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.<sup>34</sup>

Keempat, adalah yang fokus pada hubungan lingkungan hidup dan pembangunan. Di antaranya adalah karya K.H. M Ali Yafie, dalam bukunya *Menggagas Fikih Lingkungan Hidup* (2006). Dalam buku tersebut, KH. Ali Yafie menguraikan berbagai penyebab

---

<sup>33</sup> Ismail, Tesis: *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu)* (Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2018), 110.

<sup>34</sup> Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin, "*Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syari'ah "Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah"* Falah: Jurnal Ekonomi Syari'ah, (2019), 9.

kerusakan lingkungan hidup yang berorientasi pada pembangunan dan pertumbuhan tanpa batas. Mengaitkan masalah kerusakan lingkungan hidup didasarkan pada kerangka epistemologi ideology pandangan hidup manusia. Sehingga dalam menggagas fikih lingkungan hidup, KH. Ali Yafie menyodorkan pembangunan dengan pendekatan *maslahah* keumatan, yang bertitik tolak dari tujuan agama. Walaupun buku ini berbicara bagaimana pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, namun buku ini tidak menjelaskan terkait bagaimana konsep pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat.

Dengan mengacu pada sejumlah kajian dan penelitian di atas, perlu adanya kelanjutan penelitian dan kajian dari pembahasan yang sudah ada dengan fokus pada isu kesejahteraan lewat kebijakan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini berusaha melihat bagaimana kebijakan itu lahir dengan membawa makna kesejahteraan yang dinarasikan oleh pemerintah dengan tujuan agar kebijakan eksploitasi SDA diterima masyarakat Kendeng di Pati. Dengan menggunakan kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* Jamaluddin Athiyah, kesejahteraan harus dilihat dari aspek yang sifatnya individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Dan masing-masing aspek tersebut terdapat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer (*al-daruriyat*), sekunder (*al-hajiyat*) dan tersier (*al-tahsiniyat*). Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk meneliti permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu kesejahteraan masyarakat dan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Tidak bisa terpisah dari kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Pati. Oleh karena itu, ketika membaca sebuah kebijakan butuh melibatkan beberapa teori atau pendekatan tertentu. Dalam hal ini, kerangka teori berguna sebagai konsep atau model dari teori atau hubungan logis dari adanya faktor-faktor

yang diidentifikasi dalam problem penelitian.<sup>35</sup> Secara umum, peneliti menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai basic teori dan alat analisis dalam penelitian ini.

### 1. *Maqāṣid Syarī'ah* dan Kesejahteraan Umat

Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan alternatif baru dalam sebuah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan sebuah kebijakan. Sesuai dengan akar katanya, *Maqāṣid* dapat diartikan maksud atau tujuan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan atau makna-makna yang ditetapkan oleh pembuat syari'at (*Syarī'*) dalam seluruh hukum-hukum-Nya atau mayoritas hukum-Nya atau tujuan syari'at, atau rahasia yang ditetapkan oleh *Syarī'* dari hukum-hukum-Nya. *Maqāṣid Syarī'ah* juga diartikan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat, yaitu dengan menolak kerusakan dan mendatangkan kebermanfaatan.<sup>36</sup> Mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan (*dar'ul mafāsid wa jalbul al-maṣālih*) yang menjadi inti *Maqāṣid Syarī'ah* relevan dengan konteks berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya praktik eksploitasi SDA untuk kesejahteraan. Dengan mengajukan sebuah pertanyaan apakah adanya kebijakan yang melegalkan praktik eksploitasi SDA membawa kemanfaatan, atau kerusakan di tengah kehidupan masyarakat. *Maqāṣid Syarī'ah* juga dimaknai sejumlah tujuan (yang dianggap) *Syarī'*, dan konsep akhlak yang melandasi penyusunan hukum berdasarkan syari'at Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kemudahan dan sebagainya. Konsep-konsep tersebut menjembatani antara *al-tasyrī' al-islāmī* dengan konsep-konsep seperti Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan, keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>37</sup>

Adapun *Maqāṣid Syarī'ah* jika dilihat dari segi kebutuhannya terbagi menjadi tiga, yaitu *al-ḍarūrīyāh*, *al-ḥājīyāh*, *al-taḥsīnīyāh*. *al-ḍarūrīyāh* adalah kepentingan esensial atau

---

<sup>35</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 52.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fîqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006, Cet. 14. Juz II), 307.

<sup>37</sup> Jaser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2003), 5.



kebutuhan pokok, utama, atau paling mendasar bagi kehidupan manusia, baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan akhirat atau pun kemaslahatan dunia. Jika kebutuhan bagian ini tidak terpenuhi, mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*). Sehingga dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat, bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu lima hal yang menjadi tujuan syari'at, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, akal, dan harta sangat berkaitan dengan kebutuhan esensial.<sup>38</sup> Kebutuhan ini juga berhubungan dengan hal-hal penting,<sup>39</sup> atau merupakan kebutuhan yang harus ada. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia bakal terancam.<sup>40</sup> Sedangkan *al-hājīyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder), atau diperlukannya kemaslahatan ini bagian dari usaha menghindarkan kesulitan (*masyaqqah*). Apabila kebutuhan ini tidak tercukupi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi berpotensi adanya kesulitan. Oleh sebab itu, pada tingkat kemaslahatan *al-hājīyah* diperlukan adanya keringanan.<sup>41</sup> Karena terkait dengan hal-hal sekunder,<sup>42</sup> tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengancam keselamatan manusia, tetapi berdampak pada kesulitan dan kesukaran yang mungkin berkepanjangan. Namun, tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi, yang membedakan *al-darūrīyah* dengan *al-hājīyah* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran, serta kesulitan dalam kehidupan.<sup>43</sup> Sedangkan *al-tahsīnīyah* merupakan kebutuhan penunjang, atau kemaslahatan pelengkap, penyempurna dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak mempersulit

---

<sup>38</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqāṣid Syarī'ah 'ind Ibn Taimīyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2000), 63. Lihat, 'Abd al-Qadir ibn Hirzillah, *al-Madkhal ila 'ilm Maqāṣid Syarī'ah* (Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005), 115.

<sup>39</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfa min 'Ilm al-Uṣul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 274.

<sup>40</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazārīyāt al-Maqāṣid 'ind 'inda Al-Imam Syatibi* (Riyadh: Dar al-Ilmiyah al-Kitab al-Islami, 1999), 9.

<sup>41</sup> Badawi, *Maqāṣid Syarī'ah*, 66. Lihat, Hirzillah, *al-Madkhal ila 'ilm Maqāṣid*, 116.

<sup>42</sup> al-Ghazali, *al-Muṣtaṣfa*, 274.

<sup>43</sup> al-Raisuni, *Nazārīyāt al-Maqāṣid*, 9.



apalagi sampai merusak kehidupan manusia, namun menjadi tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.<sup>44</sup> Tingkatan ini terkait dengan hal-hal tersier,<sup>45</sup> atau berkaitan dengan perlindungan keperluan yang diperlukan, supaya kehidupan menjadi nyaman dan semakin nyaman, mudah dan semakin mudah, lapang dan semakin lapang. Atau dengan kata lain, sebuah kebutuhan yang dibutuhkan manusia supaya kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan.<sup>46</sup>

Tiga tingkat kebutuhan tersebut mencakup lima unsur pokok *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikenal dengan *al-kullīyāt al-khamsah*, atau populer dengan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga harta (*hifẓ al-māl*). *Hifẓ al-dīn* artinya menjaga agama dari hal-hal yang merusaknya, baik itu secara akidah maupun perbuatan, teori ataupun praktik. Termasuk menjaga keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum, dengan memberikan tindakan pencegahan terhadap setiap hal yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip agama. *Hifẓ al-nafs* artinya melindungi hak hidup setiap jiwa manusia dan juga masyarakat, dari berbagai hal yang mengancam jiwa. *Hifẓ al-aql* artinya menjaga akal manusia dari berbagai hal yang bisa mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Sebab akal adalah hal yang penting untuk menumbuhkembangkan semangat beragama, dan berkreaitifitas sehingga harus dijaga. Di antaranya dengan pendidikan, dan mencegah dari hal yang merusak akal seperti minuman keras. *Hifẓ al-nasl* artinya menjaga kelangsungan generasi atau keturunan dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap hal-hal yang dapat memutus kelangsungan hidup. *Hifẓ al-māl* artinya mengembangkan perekonomian individu dan rakyat, serta sarana yang pendukungnya, seperti bekerja, menjamin hal milik pribadi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan lainnya.

---

<sup>44</sup> Badawi, *Maqāṣid Syarī'ah*, 66. Hirzillah, *al-Madkhal ila 'ilm Maqāṣid*, 118.

<sup>45</sup> al-Ghazali, *al-Muṣṭasfa min 'Ilm*, 274.

<sup>46</sup> al-Raisuni, *Nazārīyāt al-Maqāṣid*, 9.

Sehingga untuk melihat apakah sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah berada di kebutuhan primer (*al-darūrīyāh*), sekunder (*al-hājīyāh*), atau tersier (*al-tahsīnīyāh*) dan kenapa pemerintah membuat kebijakan tersebut dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Maka perlu melihat lebih jauh alasan-alasan dan juga bagaimana tatanan kehidupan sebuah masyarakat yang terdiri dari beragam elemen. Untuk melihat hal tersebut, dalam *Maqāṣid Syarī'ah* disebut dengan '*illah*', yaitu motif atau pembangkit adanya hukum atau aturan.<sup>47</sup> Sifat inilah yang menjadi tanda adanya suatu ketentuan hukum, sehingga dengan adanya sifat ini menjadikan adanya hukum dan ketiadaan sifat itu juga menjadikan tidak adanya hukum.<sup>48</sup> Dan untuk mengetahui '*illah*', adalah dengan kata kunci khas dan sederhana, yaitu pertanyaan "mengapa". Misalnya mengapa sebuah kebijakan dibuat, dan apa tujuannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu dipastikan menggunakan kata khas pula yaitu "karena." Karena adanya kondisi yang belum sejahtera di tengah SDA yang melimpah.

Kesejahteraan atau *welfare* sendiri merupakan sebuah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan esensial individu atau kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, papan, pendidikan, kesehatan.<sup>49</sup> Sedangkan kesejahteraan sosial atau *social welfare* merupakan keadaan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang mengatur pelayanan sosial untuk membantu individu dan kelompok mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antara individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada.<sup>50</sup> Dalam perspektif ekonomi, tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dipraktekkan dengan

---

<sup>47</sup> Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul*, Vol. II, 56.

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh*, Vol. I, 646.

<sup>49</sup> Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Musthalahat al-Ulum al-Ijtima'iyah* (Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression, 1982), 445.

<sup>50</sup> *Ibid.* 339.

suatu pemerintahan yang menjalankan program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*).<sup>51</sup> Dari definisi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial tersebut, maka sangat relevan jika *Maqāṣid Syarī'ah* dimasukkan ke dalam sebuah kerangka berfikir untuk menganalisa sebuah kebijakan.

Dengan paradigma *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikenalkan Jamaluddin Athiyah yang menjadikan *al-kullīyāt al-khamsah* menjadi empat divisi, yaitu individu (*al-fārd*), keluarga (*al-usrāh*), masyarakat (*al-ummāh*) dan kemanusiaan (*al-īnsānīyāh*)<sup>52</sup> mempunyai relevansi untuk melihat sebuah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar menjadi sejahtera. Penjabaran yang berawal dari ranah pribadi tersebut mendukung tentang tugas kenegaraan mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Dengan penjabaran berikut: *Pertama*, ruang lingkup individu mencakup; (a) perlindungan terhadap jiwa personal; (b) perlindungan terhadap akal; (c) perlindungan praktik beragama; (d) perlindungan terhadap kehormatan; (e) perlindungan terhadap harta individu. *Kedua*, ruang lingkup keluarga mencakup; (a) adanya pengaturan hubungan antar masing-masing individu; (b) perlindungan terhadap keturunan; (c) adanya kenyamanan; (d) perlindungan terhadap keturunan (ras), (e) pendidikan keagamaan; (f) penguatan terhadap hubungan antar anggota keluarga, (g) menjaga keuangan keluarga. *Ketiga*, ruang lingkup masyarakat mencakup; (a) penguatan hubungan kemasyarakatan; (b) menjaga keamanan; (c) mewujudkan keadilan sosial; (d) pendidikan agama dan akhlak; (e) tolong menolong (gotong royong); (f) penyebaran ilmu pengetahuan; (g) keadilan harta publik. *Keempat*, ruang lingkup kemanusiaan mencakup; (a) upaya untuk saling mengenal dan mengetahui; (b) penetapan atau adanya sosok pemimpin; (c)

---

<sup>51</sup> Christopher Pass & Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea & Posman Halolo (Jakarta: Pustaka Erlangga, tt.), 691.

<sup>52</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwā Tafīl Maqāṣid Syarī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 139.

mewujudkan kedamaian internasional; (d) pemenuhan terhadap hak-hak manusia; (e) penyebaran dakwah Islam.

Dalam ruang lingkup individu, negara mempunyai kewajiban memperkuat keamanan untuk meminimalisir terjadinya permusuhan. Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dari semua hal yang merusak anggota badan individu, seperti adanya pembayaran denda kepada korban atau keluarganya melalui penegakan hukum *qishash*.<sup>53</sup> Negara juga mempunyai tugas menjauhkan perilaku personal yang mengarah pada permusuhan, yaitu dengan menghindarkan personal dari praktik tuduhan palsu (hoax).<sup>54</sup> Perangkat pemerintah juga mempunyai tugas membuat kebijakan transaksi dan pekerjaan seperti hukum kepemilikan, hukum waris, dan pemanfaatan lahan kosong untuk membuka lapangan pekerjaan yang halal untuk menjaga keamanan keuangan personal rakyatnya.<sup>55</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang sejahtera secara personal.

Dalam ranah keluarga, adanya hubungan antar jenis yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakjelasan silsilah dalam keluarga. Sehingga, negara mempunyai tugas memberantas praktik perzinaan dan segala hal yang mengarah pada praktik tersebut. Di antaranya lewat praktik pernikahan yang dipermudah dan digencarkan, sehingga rakyat terhindar dari fitnah hubungan antar jenis.<sup>56</sup> Adapun keturunan yang dimaksud adalah berkaitan dengan garis keturunan ke atas yang berhubungan dengan nama besar keluarga. Karena keturunan mengalami kepunahan, ketika terjadi praktik reproduksi dengan cara yang dilarang. Untuk menambah jumlah populasi keturunan, negara berkewajiban menjaga angka bahkan kalau perlu negara meringankan berbagai proses yang berkaitan dengan kelahiran anggota keluarga rakyatnya. Kebijakan tentang larangan aborsi juga harus dibuat sebagai

---

<sup>53</sup> Athiyah, *Nahwā Tafīl Maqāṣid*, 142-143.

<sup>54</sup> *Ibid.* 146.

<sup>55</sup> *Ibid.* 147.

<sup>56</sup> *Ibid.* 149.

usaha menjamin keberlangsungan sebuah keturunan.<sup>57</sup> Kasih sayang dalam sebuah keluarga juga harus berjalan lancar, khususnya antara suami istri. Adapun peran negara dibutuhkan untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang, serta kenyamanan dalam sebuah keluarga.<sup>58</sup> Karena tidak adanya cinta dan kasih sayang, serta kenyamanan dalam sebuah keluarga sebagai anggota masyarakat dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut.

Dalam ruang lingkup masyarakat, kesatuan dan keberlangsungan sebuah masyarakat harus dijaga sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan. Karena masyarakat adalah bagian penting dari institusi yang bernama negara. Oleh sebab itu, negara mempunyai tugas berupa mendirikan berbagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Seperti baitul mal atau lembaga swadaya masyarakat, masjid atau lembaga wakaf.<sup>59</sup> Langkah ini berguna sebagai upaya mereduksi nilai-nilai kapitalisme dan egoisme dalam kehidupan masyarakat di era modern. Penguatan masyarakat dengan satu ideologi, dan bahasa juga harus diperkuat oleh pemerintah,<sup>60</sup> sebagai usaha menjaga persatuan dan kesatuan. Keamanan dalam kelompok masyarakat juga harus dijamin oleh negara, baik sifatnya internal maupun eksternal. Adanya keamanan tersebut supaya berbagai aktivitas sosial-keagamaan berjalan lancar. Oleh sebab itulah, pemerintah mempunyai tugas berupa mempersiapkan kekuatan militer yang mampu mencegah, dan menanggulangi problem yang mengganggu keamanan. Dengan adanya keamanan yang terjaga, diharapkan menghasilkan sebuah keadilan yang dibutuhkan baik oleh individu, keluarga ataupun masyarakat secara luas.<sup>61</sup> Negara juga mempunyai tugas mendukung praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat, diantaranya dengan upaya memberikan himbauan dan memudahkan berbagai

---

<sup>57</sup> Athiyah, *Nahwā Tafīl Maqāṣid*, 150.

<sup>58</sup> *Ibid.* 151-152.

<sup>59</sup> *Ibid.* 155.

<sup>60</sup> *Ibid.* 156.

<sup>61</sup> Alal al-Fasi, *Maqāṣid Syarī'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* (Beirut: Dar al-Ghorb al-Islami, 1993, cet. 5), 45-56.



praktik keagamaan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.<sup>62</sup> Dalam konteks ini, masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap anggota masyarakat yang lainnya. Adanya zakat, wakaf, donasi dan kepengasuhan adalah bukti masyarakat saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dan menyadarkan bahwa mereka tidak mampu untuk hidup sendiri.<sup>63</sup> Oleh karena itu, negara sebagai regulator mempunyai tugas berupa mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada kepedulian sosial. Dengan adanya kepedulian sosial dan lahirnya berbagai lembaga kemasyarakatan, diharapkan mendukung program lainnya seperti pendidikan, pengajaran dan pemberdayaan masyarakat pada fase yang lebih jauh. Dengan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan adanya kompetensi profesi, masyarakat bisa menjadi umat yang produktif dan kreatif. Sehingga, mereka tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tetapi juga mampu menciptakan keadilan sosio-ekonomi lewat berbagai macam filantropi, maupun pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Dalam ranah kemanusiaan, berjalannya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera harus saling mengenal, saling tolong-menolong dan adanya integrasi antar kelompok masyarakat. Tidak ada keistimewaan terhadap kelompok, atau etnis tertentu. Karena antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya saling membutuhkan.<sup>64</sup> Kemudian adanya realisasi tugas manusia sebagai pemimpin yang mempunyai tanggungjawab mengelola dan menjaga keamanan masyarakat, beserta menjaga lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan bermasyarakat.<sup>65</sup> Tatanan masyarakat yang sejahtera terwujud, jika ada realisasi terhadap keselamatan atau keamanan dunia, yang berprinsip dengan nilai-nilai keadilan, menghindarkan terhadap terjadinya peperangan, atau pemaksaan di tengah kelompok masyarakat yang plural.<sup>66</sup> Negara juga harus menjaga hak-hak manusia, seperti kebebasan

---

<sup>62</sup> Athiyah, *Nahwā Tafīl Maqāṣid*, 160.

<sup>63</sup> *Ibid.* 160.

<sup>64</sup> *Ibid.* 165-166.

<sup>65</sup> *Ibid.* 167-168.

<sup>66</sup> *Ibid.* 168-169.

untuk beribadah, berekspresi dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Serta menyebarkan dakwah Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan kehidupan manusia baik, yang sifatnya dunia maupun akhirat.<sup>68</sup> Kerangka berfikir *Maqāṣidi* inilah yang digunakan untuk melihat kebijakan Pemkab Pati, berupa eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara Pati yang mendapat penolakan. Kerangka berfikir ini juga digunakan untuk melihat bagaimana kesejahteraan seharusnya diukur secara universal, bukan secara parsial, yaitu dengan mengutamakan aspek material seperti ekonomi. Karena dalam kerangka berfikir *Maqāṣidi*, penjagaan terhadap perekonomian tidak boleh menafikan penjagaan yang lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sebuah penelitian yang data dan informasinya didapat dari kegiatan di lapangan,<sup>69</sup> dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena menghendaki kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah.<sup>70</sup> Dalam kerja penelitian ini, peneliti memfungsikan diri sebagai instrument penelitian dalam mengumpulkan data dan mementingkan proses di samping produk. Kedudukan peneliti dan subjek yang diteliti setara, sehingga aktivitas peneliti tidak mengganggu subjek. Namun, pandangan informan lebih diutamakan dan peneliti langsung mengadakan analisis sejak awal penelitian hingga akhir.<sup>71</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menemukan realitas apa yang sedang terjadi

---

<sup>67</sup> Athiyah, *Nahwā Tafīl Maqāṣid*, 170.

<sup>68</sup> *Ibid.* 172.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 1.

<sup>70</sup> *Ibid.* 2-3.

<sup>71</sup> Harun Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 9-11.

mengenai masalah tertentu.<sup>72</sup> Di sini, peneliti melakukan penelitian lapangan sesuai kondisi dan proses narasi kesejahteraan dibalik kebijakan praktik eksploitasi sumber daya alam. Baik itu rencana pendirian industri semen, atau pun pertambangan yang melahirkan pro kontra di tengah masyarakat Pegunungan Kendeng Utara di wilayah Sukolilo, Tambakromo dan Kayen.

Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan mengeksplorasi atau melihat kondisi sosial, dan berbagai data yang diteliti. Dengan meng gambarkannya secara sistematis fakta, atau karakteristik tertentu, atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi dalam proses pengumpulan datanya, dan lebih menitikberatkan kepada observasi lapangan.<sup>73</sup> Jadi penelitian ini selain mengungkap data-data ilmiah, juga mengamati berbagai kasus yang terjadi di tempat penelitian.

## 2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Informan atau narasumber dalam penelitian ini, adalah para aktor yang mempunyai peran penting dalam penolakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Pati maupun Pemprov Jawa Tengah, berupa praktik eksploitasi sumber daya alam untuk kesejahteraan. Mereka adalah para aktivis yang tergabung di Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), dan anggota masyarakat yang dianggap paham detail terkait isu yang diteliti. Dan mampu memberikan informasi tentang isu kesejahteraan terkait kebijakan yang dibuat, dan kerusakan lingkungan di Pegunungan Kendeng Utara, Pati Selatan. Oleh karena itu, penetapan jumlah informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria (*purposive sampling*). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang objek apa yang

---

<sup>72</sup> Marzuki, *Metodologo Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

<sup>73</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 81.

sedang diteliti.<sup>74</sup> Sedangkan wawancara digunakan sebagai bentuk kegiatan untuk mengumpulkan atau mencari informasi, dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung, bertatap muka dengan informan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak berstruktur, artinya susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.<sup>75</sup> Kemudian dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpulan data, yaitu data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan, serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.<sup>76</sup> Dengan proses melalui pengumpulan data seperti dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, jurnal, laporan penelitian dan lainnya.<sup>77</sup>

Sedangkan analisis dokumen adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal, atau variabel yang mungkin tidak didapatkan melalui wawancara atau observasi berupa catatan di media online, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, catatan pengadilan, video dan sebagainya. Setelah data yang diperlukan terkumpul melalui berbagai metode yang digunakan, selanjutnya dilakukan analisis supaya data tersebut dapat dilihat kekurangan dan kelebihanannya. Sebagai penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif atau penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang bisa diamati.<sup>78</sup> Setelah itu, dideskripsikan dan diuraikan serta dipahami, dan dikaji untuk

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 53-54.

<sup>75</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 180.

<sup>76</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 153-154.

<sup>77</sup> Sadih, *Metode Penelitian*, 91.

<sup>78</sup> *Ibid.* 3.

mendapatkan kesimpulan yang benar dan logis. Sehingga, metode ini sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah;

Pertama adalah data primer yang menjadi pedoman utama untuk mendapatkan data. Dalam hal ini, data primer digunakan sebagai inti dari sebuah penelitian. Data primer yang digunakan; *pertama*, berbagai sumber yang terdokumentasi dan berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu isu kesejahteraan dan praktik pertambangan seperti rencana pendirian pabrik semen dan eksploitasi sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara. *Kedua*, data primer dari responden, dalam hal ini terutama masyarakat terdampak rencana pendirian pabrik semen yang tergabung dalam JMPPK. Data tersebut menjadi inti dari penelitian tentang makna kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan industri semen dan kebijakan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara. Data-data tersebut peneliti peroleh dari berbagai sumber mulai dari wawancara, terjun langsung ke lapangan dan berbagai video yang sudah terdokumentasikan.

Kedua, data sekunder atau data yang melibatkan rujukan kepada data-data tertulis, seperti dokumentasi (tulisan-tulisan di media online dan media sosial). Dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti artikel jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi yang berhubungan dengan isu dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut merupakan hal yang penting untuk memperoleh suatu gambaran latar belakang, dan sejarah yang lengkap mengenai isu kesejahteraan dan eksploitasi SDA. Berdasarkan penjabaran kedua data tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian. Sebagai instrumen kunci, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan, baik data primer maupun data sekunder dengan bersifat deskriptif,<sup>79</sup> yang kemudian diuraikan dalam penelitian ini.

---

<sup>79</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju: 2002), 33.



### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang bisa memberikan informasi mengenai objek penelitian, atau yang disebut dengan "*key person*" yang berarti sumber informasi.<sup>80</sup> Adapun subjek penelitian ini, adalah mereka yang paham terkait dengan polemik kebijakan eksploitasi di Pegunungan Kendeng dengan dalih kesejahteraan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah kebijakan eksploitasi SDA yang dinarasikan membawa kesejahteraan, dan makna kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat yang hidup di Pati Selatan, khususnya yang tergabung dalam JMPPK sebagai sampel yang dijadikan objek. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi<sup>81</sup>. Sehingga dalam penelitian ini, tidak semua populasi dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja. Dan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan strategi *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri, atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>82</sup> Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random untuk menentukan sampel dalam penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah tokoh yang ada di JMPPK.

### 4. Uji Keabsahan Data dan Analisis Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu usaha mengecek kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan. Berikut usaha yang dilakukan oleh peneliti:<sup>83</sup> membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

---

<sup>80</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, 12.

<sup>81</sup> *Ibid.* 127.

<sup>82</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 107.

<sup>83</sup> Sadiah, *Metode Penelitian*, 330.

Membandingkan yang dikatakan sumber di depan umum, dengan yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan pada saat penelitian, dengan yang dikatakan saat di luar penelitian.

Adapun analisis data digunakan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif.<sup>85</sup> Data deskriptif yang disajikan dengan menggambarkan apa yang ada dan sesuai dengan data penelitian, menggambarkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyajikan lima bab yang disusun secara sistematis dan terkait satu sama lain, serta dalam satu pembahasan yang utuh. Adapun bab-bab tersebut yaitu:

Bab I adalah pendahuluan. Yang terdiri dari latar belakang masalah, untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah, dilakukan untuk mempertegas pokok-pokok yang diteliti. Tujuan penelitian, untuk menjelaskan pentingnya secara akademik dan keilmuan penelitian ini. Selanjutnya tinjauan pustaka, untuk memberikan penjelasan dan eksplorasi di mana saja kajian-kajian literatur yang dapat digunakan dalam penelitian ini, serta untuk mengetahui tema atau fokus penelitian yang belum disentuh oleh para peneliti sebelumnya. Kemudian kerangka teoritik, yang

---

<sup>84</sup> Sadiah, *Metode Penelitian*, 92.

<sup>85</sup> Sedarmayanti, *Metodelogi Penelitian*, 33.

digunakan sebagai alat analisis dalam mengungkap berbagai argumen dan tendensi teori terhadap isu yang diteliti. Dan metode serta langkah-langkah penelitian, yang berguna untuk menjelaskan bagaimana dan cara semacam apa yang digunakan dalam penelitian ini, serta bagaimana langkah-langkah sistematis penelitian yang dilakukan dan diselesaikan sebagai karya akademik, serta bisa dijadikan sebagai sebuah referensi.

Bab II membahas tentang selang pandang Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati, letak geografis dan kekayaan SDA yang ada di wilayah tersebut. Tipologi masyarakat yang hidup di kawasan tersebut, termasuk kelompok masyarakat adat komunitas Samin dan gerakan masyarakat peduli Kendeng, yaitu JMPPK yang sering melakukan perlawanan terhadap kebijakan eksploitasi SDA di Kendeng, seperti rencana pembangunan industri semen yang mendapat dukungan pemerintah.

Bab III membahas tentang paradigma baru *Maqāṣid Syarī'ah* yang mempunyai kaitan erat dengan Kesejahteraan sosial. Penjabaran tentang paradigma baru *Maqāṣid Syarī'ah* dalam bab ini dianggap penting, karena selama ini *Maqāṣid Syarī'ah* sering digunakan dalam penelitian-penelitian yang berorientasi pada hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, *Maqāṣid Syarī'ah* dijadikan alat analisis untuk melihat sebuah kebijakan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dijelaskan secara khusus, agar menjadi jelas sekaligus memperkenalkan bahwa Islam bukan soal halal-haram, namun sangat universal dan bisa masuk ke dalam semua sendi kehidupan manusia dan berbagai disiplin keilmuan.

Bab IV menjadi bab utama, karena mengulas temuan-temuan yang kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, bab ini membahas tentang bagaimana narasi dan makna kesejahteraan dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan eksploitasi SDA, seperti izin pendirian industri semen dan berbagai kebijakan

lainnya. Kemudian artikulasi yang dimainkan, konflik dan penolakan yang terjadi akibat kebijakan yang dibuat pemerintah, dan temuan-temuan lainnya yang kemudian juga dianalisis dengan teori *Maqāsid Syarī'ah*, seperti makna kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng Utara, dan posisi kelestarian lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara sebagai counter narasi dari masyarakat terhadap kebijakan eksploitasi yang dibuat pemerintah. Dan sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap kebijakan eksploitasi SDA yang dibuat oleh pemerintah. Bab ini juga akan menyinggung bagaimana tugas pemerintahan dan peran pemimpin mempunyai kaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya.

Bab, V adalah Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan isi yang dipaparkan dalam penelitian ini, dan beberapa saran yang perlu ditulis, jika ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis ingin memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan sedikit saran yang ingin penulis sampaikan.

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan hasil daripada pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dan muncul beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pegunungan Kendeng Utara merupakan pegunungan yang menyimpan kekayaan alam berupa batuan karts yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan menjadi salah satu bahan baku pembuatan semen. Pegunungan yang membentang dari Jawa Tengah hingga Timur ini dihuni oleh mayoritas masyarakat petani, dan hidup juga masyarakat adat Samin. Kondisi bumi yang subur dan SDA melimpah, Kabupaten Pati masih tergolong daerah kurang maju, baik dalam pembangunan maupun ekonomi. Banyaknya pengangguran, kondisi masyarakat yang belum sejahtera, dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan eksploitasi sumber daya, yaitu dengan merubah beberapa peraturan daerah dan memberikan izin terhadap industri pertambangan, seperti industri semen. Kebijakan eksploitasi SDA tersebut dinarasikan dapat membawa masyarakat menjadi sejahtera, yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru, perputaran ekonomi yang tinggi, kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan dibantu oleh industri, dan membawa dampak besar terhadap pembangunan di Pati, dan Pemkab Pati akan mendapatkan peningkatan PAD yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai narasi dengan perspektif ekonomi dan pembangunan dimunculkan oleh pemerintah, supaya kebijakan yang dibuatnya diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di Pati Selatan. Termasuk narasi bahwa kebijakan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara tidak akan merusak lingkungan,



karena masyarakat yang bertani masih tetap bisa bertani. Bahkan hadirnya kebijakan tersebut bisa membantu para petani, karena industri pertambangan juga akan memberikan bantuan kepada petani dengan berbagai program tanggung jawab sosialnya. Beragam narasi kesejahteraan, bahwa kebijakan eksploitasi SDA di Kendeng akan mengubah kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, dari susah menjadi bahagia dan dari terbelakang menjadi maju, dibentuk oleh Pemkab Pati dan kelompok pro kebijakan tersebut.

Kedua, kesejahteraan dibalik kebijakan eksploitasi SDA adalah makna yang dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai narasi yang dimunculkan ke publik. Tujuannya, adalah agar kebijakan tersebut diterima dan mendapatkan dukungan masyarakat luas. Beragam narasi yang dibentuk untuk mendefinisikan kesejahteraan dengan mengeksploitasi SDA oleh industri pertambangan, seperti pabrik semen, ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik di tengah masyarakat yang hidup di Pegunungan Kendeng. Narasi kesejahteraan yang digunakan untuk menopang kebijakan yang sudah dibuat, ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Kebijakan eksploitasi SDA dengan memberikan izin pertambangan kepada PT Semen Gresik (2006-2009) dan PT Sahabat Mulia Sakti (2010-sekarang), membuat masyarakat melakukan perlawanan. Mereka melawan narasi tentang kesejahteraan yang dibuat oleh pemerintah, bahwa kesejahteraan bukan dengan menjadi pekerja di industri semen yang merusak lingkungan. Menjadi petani dan memanfaatkan kelestarian alam di Pegunungan Kendeng telah menjadikan hidup masyarakat sejahtera. Tetapi, jika Pegunungan Kendeng ditambang, dirusak, air hilang justru akan melahirkan bencana. Bagi masyarakat di Kendeng, kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dengan perekonomian saja. Tetapi juga ketenangan dan ketentraman hidup, lingkungan yang lestari, air yang melimpah dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun dan damai. Kebijakan eksploitasi SDA yang dibuat oleh pemerintah yang sering dinarasikan membawa kesejahteraan ternyata tidak mendapatkan penerimaan di masyarakat, karena membuat kehidupan masyarakat renggang. Dan kebijakan tersebut tidak

sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta kebutuhan masyarakat yang mayoritas adalah petani yang mengandalkan sumber irigasi lahan pertaniannya dari Pegunungan Kendeng. Besarnya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa, narasi kesejahteraan yang dibentuk untuk menerapkan kebijakan eksploitasi SDA tidak diterima masyarakat. Karena kebijakan tersebut bukanlah hal yang sifatnya *al-darūriyāt* bagi masyarakat yang mayoritas petani, tetapi justru mengancam hal yang sifatnya *al-darūriyāt* bagi petani, yaitu air dan tanah sebagai lahan untuk bertani dan sumber kehidupan. Tidak adanya penerimaan tersebut terbukti dengan belum berdirinya industri pertambangan skala besar di Pati, padahal sudah direncanakan sejak 2006. Dan perlawanan yang terus dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat terhadap praktik pertambangan skala kecil yang mulai menjamur di Pegunungan Kendeng.

Ketiga, kesejahteraan hidup adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari tingkat kebutuhan yang sifatnya primer (*al-darūriyāt*), sekunder (*al-hājīyāt*) dan tersier (*al-tahsīnīyāt*). Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak bisa lepas dari peran negara. Sehingga pemerintah mempunyai tugas menyediakan sekaligus menjaga kesejahteraan rakyatnya. Usaha untuk menyediakan kesejahteraan tersebut diantaranya dengan membentuk beberapa aturan dan kebijakan, yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng yang coba diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan mensejahterakan rakyat, justru mengusik kesejahteraan hidup yang sudah dijalani masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Karena kebijakan tersebut melahirkan perasaan terancam, ketidaknyaman, kondisi tidak aman, dan renggangnya kehidupan masyarakat akibat adanya kebijakan eksploitasi SDA tersebut. Bahkan, kebijakan tersebut melahirkan konflik yang bukan hanya antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi sesama anggota masyarakat. Lahirnya berbagai konflik dan ketegangan di tengah masyarakat akibat adanya sikap pro dan kontra terhadap kebijakan yang

dibuat, dan menggerus kesejahteraan hidup yang dijalani oleh masyarakat di Pati Selatan. Sebab, kesejahteraan bagi masyarakat di Pati Selatan adalah kehidupan yang tentram, keadaan lingkungan hidup yang sehat, dan tersedianya lahan dan sumber mata air yang bisa digunakan untuk bertani, serta masyarakat yang rukun damai dalam kehidupannya. Sehingga, dengan tergerusnya nilai-nilai kesejahteraan yang sudah ada justru memperlebar jurang menuju kesejahteraan yang diimpikan sesuai dengan amanat konstitusi negara. Dengan alasan-alasan yang ada, kebijakan tersebut tidak berada pada tingkat kebutuhan tersier (*al-tahsīnīyāt*) maupun sekunder (*al-ḥājīyāt*), apalagi primer (*al-ḍarūrīyāt*). Sebab selain berpotensi merusak lingkungan, kebijakan tersebut juga telah melahirkan ketidaktentraman dan ketidaknyamanan kehidupan sosial masyarakat.

## 2. Saran

Setelah mencermati dari berbagai pembahasan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, ada beberapa hal yang penulis anggap bisa menjadi saran:

Pertama, sebuah kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dibuat oleh para pemangku kebijakan, seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas, harus berdampak positif pada kehidupan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka dan mempertimbangkan aspek sosial-budaya mereka, bukan hanya ekonomi-politik. Kebijakan pembangunan seharusnya tidak direduksi menjadi pembangunan ekonomi saja, namun juga pembangunan terhadap sumber daya manusianya. Kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Kedua, pemimpin adalah panutan masyarakat. Maka sudah selayaknya seorang pemimpin memberikan contoh yang penuh dengan sopan santun ketika membuat kebijakan. Ketika masyarakat sudah memenangkan putusan dalam sebuah perkara melalui jalur hukum, seharusnya pemerintah berfikir ulang "santun atau tidak jika kebijakan tersebut dilanjutkan",

bukan malah berusaha memaksakan dengan menggugat kembali keputusan yang telah dimenangkan masyarakat. Tetapi mencari alternatif dengan membuat kebijakan lain yang bisa diterima, dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai objek kebijakan dan pembangunan. Pola pembangunan yang hanya berorientasi pada kebutuhan pasar, harus digeser ke arah pembangunan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat mau menerima sebuah kemajuan dan tidak tercerabut dari akar budaya yang sudah dijalani selama ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Mudhofir. *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Abdullah, Irwan. et all, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Achmad, Ubaidillah. *Islam Geger Kendeng dalam Konflik Ekologis dan Rekonsiliasi Akar Rumpun* Jakarta: Prenada, 2016.
- Agus Maladi Irianto, *Media dan Multikulturalisme*, ed. Sri Rahayu dan Muslimin A.R. Effendy *Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan* Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2009.
- al-Baidhawi, *Minhāj al-Wuṣūl ila 'Ilm al- Uṣūl* Thaba'ah Mahmud Shabih, t.th.
- al-Banani, 'Abdurrohman. *Hāsiyah al-Banānī ala Syarh al-Mahallī ala Matn al-Jam'u al-Jawāmi'* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Fasi, Alal. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyah wa Makārimuhā*, cet. 5. Beirut: Dar al-Ghorb al-Islami, 1993.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustaṣfā min Ilm Uṣūl* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustaṣfā min Ilm Uṣūl*, Tahqiq Dr. M Sulaiman al-Asyqar Beirut: al-Resalah, 1997 M/1418 H.
- al-Hasani, Isma'il. *Nazārīyāt al-Maqāṣid 'ind al-Imam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'în 'an Rabb Al- 'ālamīn* Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Khadimi, Nur al-Din ibn Mukhtar. *'Ilm Maqāṣid al-Syar'īyah* Riyad: Maktabat al-'Abikan, 2001.
- al-Khadimi, Nur al-Din Mukhtar. *Al-Ijtihād al-Maqāṣidī Hujjīyatuhu Ḍawābituhu Majalatuhu*, Juz I. Doha: Wizarat al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah, 1998.
- al-Najjar, Abdul Majjid. *Maqāṣid Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah* Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 2008.
- al-Qarādhawi, Yusuf. *Rī'āyah al-Bī'ah fī al-Syarī'ah Islāmīyah* Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- al-Raisuni, Ahmad. *Nazārīyāt al-Maqāṣid 'inda al-Imam al-Syatibi* Riyadh: Dar al-Ilmiyah al-Kitab al-Islami, 1999.
- al-Raysuni, Ahmad. *Bahs Fi Al- Maqāṣid Syarī'ah; Nasy'atuhū Wa Tatūwwuruhu Wa Mûstâqbulûhû* London: Muassasat al-Furqan li Turath al-Islami, 2005.
- al-Raysuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* Rabat: al-Dar al-Bayda, 1999.
- al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husayn. *al-Mahṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl* Damaskus: Mu'assasat al-Risalah, t.th.
- al-Qarafi, *Syarh Tanqīh al-Fuṣūl* Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah/Beirut: Dar al-Fikir, 1997.



al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

al-Shatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid I, Vol. II. al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Wuzarat al-Shu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irshad, t.th.

al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, edisi al-Hudar Husan, , Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.

al-Yubi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud. *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Syarī'iyah* Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.

al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīt li al-Zarkasyi*, juz 5. Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fīqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

al-Zuhaili, Muhammad. *Māwsū'ah Qaḍāyā Islāmīyah Mu'aṣīrah: Maqāṣid Syarī'ah* Vol. V. Damaskus: Dar Maktabi, 2009.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islamic and Secular State* Massachusetts: Harvard University Press, 2010.

Ardianto, Hendra Try. *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan* Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2016.

Aryo, Bagus. *Tenggelam Dalam Neoliberalisme? Penetrasi Ideologi Pasar Dalam Penanganan Kemiskinan* Depok: Penerbit Kepik, 2012.

Athiyah, Jamaluddin. *Nahwā Taf'īl Maqāṣid Syarī'ah* Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Arif, Syaiful. *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013.

Asshiddie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. Ke-2, Jakarta: BIP 2008.

Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Maqāṣid Syarī'ah al-Islāmīyah* Yordania: Dar al-Nafa'is, 2001.

Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Uṣūl al-Nizām al-Ijtima' fī al-Islām* (Tunis: as-Syirkah al-Tunisiyah li Tauzi', t.th)

Auda, Jasser. *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid ināṭātul al-Ahkām al-Syar'iyah bi Maqāṣidiha* Herndon: al-Ma'had Ali li al-Fikr al-Islami, 2006.

Azizy, Satria Hibatal. *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan dalam Islam* Ponorogo: CIOS, 2015.

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāṣid Syarī'ah 'ind Ibn Taimiyah* Yordania: Dar al-Nafa'is, 2000.

Badawi, Ahmad Zaki. *Mu'jam Muṣṭalāḥāt al-'Ulūm al-Ijtimā'īyyah* Beirut: Maktabah Lubnan, New Impression, 1982.

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi) Jakarta: Gramedia, 2008.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics an Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute, 2001
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy* dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam* Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995.
- Christopher Pass & Bryan Lowes, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea & Posman Halolo Jakarta: Pustaka Erlangga, tt.
- Dayf, Shawqi. et all. *al-Mu'jām al-Wasiṭ* Mesir: Maktabat al-Shuruq al-Dawliyah, 2004.
- Dwi Wulan Pujiriyani dkk, *Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI*, dalam Tim Peneliti STPN, 2012, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012)*, Yogyakarta: PPPM-STPN, 2012)
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy* Prentice-Hall, New Jersey, Chapter 1, 1981.
- Fakih, Mansour *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fromm, Erich. *Seni Mencintai* Yogyakarta: Basabasi, 2018.
- Gillivary, Mark Mc. *The Human Development Index: Yet Another Redudat Composite Development Indicator? World Government* Great Britain: Pergamon Press, Vol. 19 No. 10. 1991.
- Hadjono, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan* Surabaya: Yuridika, 1993.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* New York: Columbia University Press: 2013.
- Hargens, Boni. *Demokrasi Radikal: "Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Postmodern Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe"* Jakarta: PARHRHESIA, 2006.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, Cet-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Husin Hamid. *Nazārîât Al-Maslahah Fî Al-Fiqh Al-Islāmî* Kairo: Dar al-Nahdah al 'Arabiah, 1971.
- Herlambang Perdana Wiratman, dkk, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, ed. Yance Arizona-Edisi-1 Jakarta: Huma, 2010.
- Hirzillah, 'Abd al-Qadir ibn. *al-Madkhāl ila 'ilm Maqāṣid Syarī'ah* Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005.
- Hoffer, Eric. *Gerakan Massa* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learn's Dictionary of Current English* Oxford: Oxford Unversity Press, 1995.

- Hutomo, Suripan Sadi. *Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya dalam Tradisi dari Blora* Semarang: Citra Pariwisata, 1996.
- Hutomo, Suripan Sadi. *Tradisi dari Blora* Semarang: Penerbit Citra Almamater, 1996.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Syarī'ah versus Uṣul al-Fiqh; Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibn Manzur, *Lisān al-'Arāb* Kairo: Dar al-Ma'arif, t.tth.
- Irianto, Agus Maladi. “*Media dan Multikulturalisme*” dalam *Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, 2009.
- Irianto, Maladi dan Thohir, M. “*Ekosistem Dieng dan Kebijakan Daerah Kabupaten Wonosobo*” Semarang: Puslit Sosbud LPPM Undip, 2004.
- Jamin, Mohammad. *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Tengah Pandemi Covid 19* Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.
- Jamin, Mohammad. & Mulyanto. *Revitalisasi Nilai-Nilai Tentang Perempuan dalam Menghadapi Modernisasi Menuju Kesetaraan Gender: Studi Pemberdayaan Local Wisdom Masyarakat Samin di Kabupaten Blora, Jawa Tengah* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik dan Lingkungan*, Yogyakarta: Penerbit Koekoesan, 2007.
- Mahfudh, M. Ahmad Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial* Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mansour, Fakihi. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mangunwijaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam Dalam Islam* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Narbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nasution, Harun. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* Bandung: Tarsito, 1998.
- Parson, Wayne. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Paskarina, Caroline, dkk. *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan; Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal* Yogyakarta: Research Center for Politics and Government/PolGov, 2015.



- Prasetyo, Galih. *Indonesia dalam Cengkraman Liberalisme: Krisis, IMF dan Jalan Pemulihan Ekonomi* Depok: Penerbit Koekoesan, 2015.
- Rachman, Noer Fauzi. "Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan Indonesia, 1945-2009", Ed. Remy Madiner, *Revolusi Tak Kunjung Selesai: Potret Indonesia Masa Kini* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.
- Rahmawati, Desi. *Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente* Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2018.
- Ridha, Mohammad Rasyid. *al-Wahyu al-Muhammadī: subūt al-Nubuwwah bi al-Qur'ān wa Da'wāt Syu'ūb al-Madanīyah Ila al-Islam* Cairo: Mu'asasah 'Izz al-Din, t.th.
- Ridha, Mohammad Rasyid. *Tafsīr al-Manār* Kairo: al-Hai'a al-Misriya lil Kitab al-'Amma, Juz 1, 1972.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sahal Mahfudh, dkk, *Respon Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial* Pati: Pusat Studi Pesantren & Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah, 2017.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, cet. Ke-1. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Sano, Quttub. *Qirā'ah Ma'rifiyyah fi al-Fikr al-Uṣūli* (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, ed-1, 2003.
- Seabrook, Jeremy. *Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme* Yogyakarta: Resist Book, 2006.
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* Bandung: Mandar Maju: 2002.
- Smith, S Stephenson. *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language* et.al Floride: Tident Press International, 1996.
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan* Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1983.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-7. Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2008.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ix 2020.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik* Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabet, 2007.
- Syaltut, Muhammad. *al-Islām Aqīdah wa asy-Syarī'ah* Lebanon: Dar al-Qalam, 1996.
- Syarif, Amiroedin *Perundang-Undangan Dasar: Jenis dan Teknik Membuatnya* Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Taimiyah, Ibn. *al-Fatāwā al-Kubrā, Majmu' al-Fatāwā Ibn Taimiyah* al-Saudiyah: t.th.
- Yafie, Ali. *Merinstis Fiqh Lingkungan Hidup* Jakarta; Ufuk Press, 2006.
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh 'Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqashid asy-Syari'ah'* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Wacana, Petrasa dkk.. *"Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah"* Yogyakarta: Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Warasih, Esmi. dkk. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal* Yogyakarta; Penerbit Thafa Media, 2016.

Wahid, Abdurrahman *Universalisme Islam Dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam* Pelita, 26 Januari 1988.

#### **Artikel Jurnal**

Anderson, James E. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston New York: Chapter 1, 2, 3, (1979).

Amaroh, Siti. *"Penilaian Kinerja Sosial Berbasis Maqasid Syariah Pada Bank Umum Syariah Hasil Konversi Di Indonesia."* MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 2 No. 1, 2018.

Aprianto, Tri Chandra. *"Perampasan Tanah Dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep"* BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, No. 37 Tahun 12, April 2013.

Aprillia, *"Analisis Nilai Ekonomi Pegunungan Batu Kapur: Eksploitasi Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati."* Prosiding Seminar Nasional Keindonesiaan III Tahun 2018 *"Penguatan SDM di Era Disrupsi Teknologi Melalui Pendidikan"* FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, 2018.

Asrawijaya, Enkin. *Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen di Pegunungan Kendeng*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, Juli 2020.

Buana, Dian Chandra. *"Kearifan Lokal Versus Otoritas Penguasa (Studi Kritis Perlawanan Hukum Masyarakat Adat Sikep Terhadap Pendirian Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati"* Jurnal Politika: Vol.8 No.1, 2012

Dahlan, Ahmad & 'Irfan, Santosa. *"Menggagas Negara Kesejahteraan"* El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II No. 1, Januari-Juni, 2014.

Hasan, Nur. *"Relationship of Maqasid al-Shari'ah with Usul al-Fiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects)"* Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, April, 2020.

Imani, Safarinda. *"Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah"* Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2019.

Meida, Avid Nur, dkk. *"Konflik Corporate vs Society: Analisis terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati."* Journal of Politic and Governmental Studies Vol 2, No 2, 2013.

Novianto, Arif. *"Berebut Saminisme: Artikulasi Politik Masyarakat Adat dalam Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng"* ed. Ed. Wahyudi Kumorotomo dan Yuyun Purbokusumo, Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2020.

Purnaweni, H. *"Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah"* Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 20 No. 1, 2014.



Ridwan, Nurma Ali. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal" *Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2007.

Subekti, Tia. "Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia" *Jurnal Transformatif*, Vol. 2. Nomor 2, September, 2020.

Sudarmadji dan Adji T. N, *Hydrological Properties of Bribin Underground River System "Experience Learned for Seropen River System Project"* Integrated Water Resources Management Seminar, Oktober 2008.

Suharko, "Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016" *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 20, No 2, 2016.

Suharko, *Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reportoar Gerakan Petani*. Jurnal Ilmu dan Politik, Vol 10, No 1, Juli 2006.

Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syari'ah "Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah" *Falah: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2019.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Dan Masyarakat Bangsa* Jurnal Pesantren, No. 3, Volume VI, 1989.

Widowaty, Yeni. "Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Media Hukum* Vol 19, No 2, 2012.

### **Tesis-Sripksi**

Ismail, Tesis: *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewe Kabupaten Dompu)* Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2018.

Prabowo, Muhammad Sindu. *Resolusi Konflik Pendirian Pabrik Semen Antara PT Sahabat Mulia Sakti Dengan Masyarakat di Kab. Pati 2015 (Studi Kasus; Peran Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)* Yogyakarta: UMY, 2017.

### **Dokumen dan wawancara**

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia No. 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo

KA-ANDAL PT, SMS 2011.

*Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan* (Jakarta: Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017)

Peraturan Daerah Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pati 2011-2030

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1).

Indikator Pertanian Kabupaten Pati 2020, (Pati: BPS, 2020)

Fahmi Panimbang, *Para Bohir di Industri Semen*

*Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), "Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan"* (Jakarta: Kantor Staff Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup, 2017, tahap 2 Volume 1

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pati, 2017-2022, IV

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati 2005-2025

Wawancara dengan Suharno, warga ing satu terdampak pendirian pabrik semen, petani Slungkep dan tokoh JMPPK Kayen, (Jimbaran, Kayen, 15 Juli, 2021).

Wawancara dengan Gunarti, Tokoh Perempuan Sedulur Sikep dan Penolak Rencana Pendirian Pabrik Semen dan Pertambangan di Pegunungan Kendeng. Sukolilo, Pati (22 November, 2020).

### **Media Online dan Video Online**

Sri Hartati Samhadi & Ahmad Arif, *"Investasi Semen: Kami Juga Ingin Maju"*, Kompas Edisi 1 Agustus 2008

<https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/> (diakses 4 April)

<https://infojateng.id/read/7777/pengangguran-dan-penduduk-miskin-pati-meningkat/> (diakses 5 April, 2021).

<https://www.patinews.com/perselingkuhan-karena-ditinggal-boro-merantau-dominasi-perceraian-di-pati/> (diakses 10 April, 2021).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/28/wilayah-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-jawa-tengah> (diakses 6 Mei, 2021).

<https://boemimahardika.wordpress.com/2016/03/23/ancaman-kerakusan-pabrik-semen-di-bumi-kasunanan-prawoto/> (diakses 19 Mei, 2021).

<https://www.gatra.com/detail/news/466676/politik/pati-kabupaten-subur-yang-masih-miskin> (diakses 6 Mei, 2021).

<https://jawatengah.online/29/11/2019/memacu-pertumbuhan-ekonomi-pati-terbuka-untuk-pabrik-semen/> (diakses 10 Juni, 2021).

<https://news.detik.com/berita/d-3073629/petani-menangis-di-ptun-semarang-saat-menang-gugatan-terkait-izin-perusahaan-semen> (diakses 7 Juni, 2021).

<https://www.patikab.go.id/v2/id/2016/08/03/ptun-surabaya-kabulkan-permohonan-bupati-pati-ter/> (diakses 7 Juni, 2021).

<https://mitrapost.com/2020/08/18/padi-senjata-kabupaten-pati-di-tengah-krisis-bukan-industri/> (diakses 10 Juni, 2021).

<https://nasional.tempo.co/read/787919/penolak-pabrik-semen-pawai-dan-tanam-seribu-pohon-di-kendeng/full&view=ok> (diakses 30 Juni, 2021).

<https://mitrapost.com/2020/08/18/padi-senjata-kabupaten-pati-di-tengah-krisis-bukan-industri/> (diakses 10 Juni, 2021).

<https://www.liputan6.com/regional/read/4121108/pabrik-semen-di-aceh-besar-dituding-jadi-biang-kekeringan-kok-bisa>, (diakses 11 Juni, 2021).

<https://pmb.lipi.go.id/karst-kerusakan-lingkungan-dan-kelangsungan-hidup/> (diakses 11 Juni, 2021).

<http://www.aman.or.id/2019/05/pabrik-semen-yang-merusak-lingkungan-masyarakat-adat-yang-merawat-lingkungan/> (diakses 11 Juni, 2021).

<https://mitrapost.com/2020/08/18/padi-senjata-kabupaten-pati-di-tengah-krisis-bukan-industri/> (diakses 13 Juni, 2021).

<https://kompas.id/baca/nusantara/2020/01/07/banjir-bandang-masih-mengancam-pati/> (diakses 11 Juni, 2021).

<https://jawatengah.online/29/11/2019/memacu-pertumbuhan-ekonomi-pati-terbuka-untuk-pabrik-semen/> (diakses 26 Juni, 2021).

<https://www.patikab.go.id/v2/id/visi-misi-skpd> (diakses 30 Juni, 2021).

<https://www.radarmuria.com/2019/02/pabrik-semen-di-pati-akan-dibangun.html> (diakses 30 Juni, 2021).

<https://jawatengah.online/29/11/2019/memacu-pertumbuhan-ekonomi-pati-terbuka-untuk-pabrik-semen/> (diakses 1 Juli, 2021).

<http://www.releaseinsider.com/penolakan-lsm-atas-investasi-pabrik-semen-munculkan-pro-kontra/> (diakses 1 Juli, 2021).

Pengakuan Korban Pabrik Semen." <https://www.youtube.com/watch?v=rEh5pNSjcqs>, (diakses 4 Mei, 2021).

Dialog Investasi: Membaca Peluang Investasi di Pati, 25 April 2016 bersama Bupati Pati Haryanto, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, Dirut PT Indocement Christian Kartawijaya, di Hall 2<sup>nd</sup> Floor Pasar Pragolo, Pati, <https://www.youtube.com/watch?v=BIViDsCwtF4>, (diakses 15 Mei, 2021).

Cerita Warga Kendeng Pegunungan Kendeng dihabisi Penambang Liar, <https://www.youtube.com/watch?v=O3djQu99PxY>, (diakses 20 Mei, 2021).

Hipotesa Pembangunan Pabrik Semen <https://www.youtube.com/watch?v=BCGNDeeDplA>, (diakses 20 Mei, 2021).

Benahi Komunikasi Bupati Pati Dialog dengan Warga Kontra Semen <https://www.youtube.com/watch?v=yXQmSHmANPg>, (diakses 20 Mei, 2021).

Polemik KLHS, Pembangunan Wajib Penuhi Kualifikasi Dampak Lingkungan, <https://www.youtube.com/watch?v=GdmkcXDiJxg>, (diakses 20 Mei, 2021).

Wisata Gua Pancur, <https://www.youtube.com/watch?v=dNNHqo4WxmM> (diakses 30 Juni, 2021).

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pabrik Semen Berada Di Luar KBAK Sukolilo, <https://www.youtube.com/watch?v=m7bjpxwtWv4> (diakses 1 Juli, 2021).

CSR PT Indocement Ikuti Pameran KUKM, <https://www.youtube.com/watch?v=Y94qMWNpDAs> (diakses 2 Juli, 2021).

Koperasi Sri Kandi Jaya, <https://www.youtube.com/watch?v=nfx2lG3WzSs> (diakses 2 Juli, 2021).

CSR PT Indocement Tanam 2000 Pohon, <https://www.youtube.com/watch?v=JZuFmjStUJM> (diakses 2 Juli, 2021).

Hari Lingkungan Hidup Warga Desa Maitan dan PT Indocement Gelar Kenduri Mata Air, <https://www.youtube.com/watch?v=JgNJMN1Vdjo> (diakses 2 Juli, 2021).

CSR Indocement, Petani Mendapatkan Pengarahan Peningkatan Ketahanan Pangan, [https://www.youtube.com/watch?v=M5mW\\_TujFZA](https://www.youtube.com/watch?v=M5mW_TujFZA) (diakses 2 Juli, 2021).

Petani Mendapatkan Pengarahan Peningkatan Ketahanan Pangan, [https://www.youtube.com/watch?v=M5mW\\_TujFZA](https://www.youtube.com/watch?v=M5mW_TujFZA) (diakses 3 Juli, 2021).

Media Visit to Indocement, <https://www.youtube.com/watch?v=ZI6urMKYrbc> (diakses 3 Juli, 2021).

Komitmen Indocement Terhadap Warga Pati, <https://www.youtube.com/watch?v=0cZfoemo3t0> (diakses 3 Juli, 2021).

Sosialisasi lanjutan pendirian pabrik semen PT SMS di Pati 6 April 2011, Komitmen Indocement Terhadap Warga Pati, <https://www.youtube.com/watch?v=0cZfoemo3t0> (diakses 3 Juli, 2021).